

Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pengelolaan BUMDes di Desa Dulukapa

Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara

Nur Istiyan Harun¹, Ayub Usman Rasid², Annisa Rizqa Alamri³

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo

²Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo

Korespondensi: isty.harunc@gmail.com

ABSTRAK

Sejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian disusul Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang pemerintahan desa yang mengamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik dengan masing-masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan akuntabel apabila perencanaan pembangunan desa telah dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMDesa. Selain itu, dana dimaksud dapat digunakan untuk mengembangkan desa melalui pemberdayaan BUMDes. Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDesa dan pengelolaan Bumdes tidaklah mudah, melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Keterbatasan pemerintah desa Dulukapa dalam pengetahuan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes menjadi masalah serius dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang lebih baik.

Tujuan pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes adalah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Dulukapa melalui pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes. Metode pelaksanaan kegiatan adalah; 1) Pelatihan penyusunan RPJMDesa, 2) Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan, 3) Bimbingan Pengelolaan Bumdes.

Dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan RPJMDesa selain pemberian materi, juga dilakukan dengan cara *on job training*. Sementara untuk pengelolaan BUMDes ada beberapa poin penting yang di peroleh masyarakat, seperti manajemen pengurus, bisnis *plan*, manajemen keuangan, masalah internal dan pengawasan. Tim pengabdian juga memberikan *master plan* pantai wisata Dulukapa serta pengelolaan UMKM. Adapun bentuk BUMDes yang ditawarkan, juga merupakan *follow up* dari RPJMDes yang dibuat bersama oleh tim pengabdian dengan peserta bimtek. Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini yaitu peningkatan kapasitas aparat desa terkait dengan penyusunan RPJMDes dan sistem manajemen BUMDes.

Kata kunci : Pendampingan Penyusunan RPJMDes; Pengelolaan BUMDes; Gorontalo Utara

ABSTRACT

Since the issuance of Law number 6 of 2014 concerning villages, then followed Government Regulation number 47 of 2015 concerning village governance which mandates that equitable development must start from the village. To realize this development, the central government gave fantastic funds to the villages, with each village receiving approximately 1.4 billion rupiah. This village fund can be managed well and accountably if the village development plan has been made correctly and on target as stated in the village medium term development plan document. In addition, these funds can be used to develop villages through BUMDes empowerment. The problem now is that the preparation of the village medium term development plan and management of the village community is not easy, but special attention is needed in the form of knowledge and skills about development planning and sensitivity to the conditions of the village in which it lives. The limitations of the Dulukapa village government in the knowledge of the preparation of the village medium term development plan and the management of the BUMDes are serious problems in better management of village funds and village development.

The objective of assisting in the preparation of RPJMDes and management of BUMDes is to provide solutions to problems faced by the Dulukapa village government through mentoring in the preparation of RPJMDes and management of BUMDes. The methods of implementing the activities are: 1) Training on the preparation of the village medium term development plan, 2) Assistance in the preparation of the village medium term development plan, and 3) Guidance for Bumdes management.

In the implementation of assistance in the preparation of the village medium term development plan in addition to providing material, it is also done by on job training. While for the management of BUMDes, there are some important points obtained by the community, such as management of management, business plan, financial management, internal matters and supervision. The service team also provided Dulukapa beach tourism master plan and MSME management. The BUMDes form offered is also a follow-up of the RPJMDes that was made jointly by the service team and the technical assistance participants. The output achieved in this community service activity is to increase the capacity of village officials in relation to the development of the RPJMDes and the BUMDes management system.

Keywords: *Assistance for the Development of RPJMDes; Management of BUMDes; North Gorontalo*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2005, sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan ini terjadi karena mulai diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, dimana pemerintah daerah termasuk pemerintah desa diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ditambah lagi sejak diberikannya UU nomor 6 tahun 2014 kemudian disusul Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang pemerintahan desa mengamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa. (Training 2016).

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik dengan masing-masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan akuntabel apabila perencanaan pembangunan desa telah dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang terbungkus dalam dokumen RPJMDesa. Penyusunan RPJMDesa berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Namun demikian, tidak semua aparat desa dapat membuat RPJMDesa dengan baik sesuai kebutuhan, meskipun terdapat panduan teknis dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang dimotori oleh Bapennas (Bandiyah:2016).

Penyusunan RPJMDesa dinilai sangat penting karena program yang akan dilaksanakan di desa yang akan di danai oleh APBDesa harus tercatat dan terprogram dalam dokumen tersebut diatas. Peserta program pendampingan merupakan pelaksana strategis yaitu sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang ada di tingkatan desa yang memiliki kewenangan dalam penyusunan peraturan tingkat desa dan pelaksana program di tingkat desa.

Seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa penyusunan RPJMDesa mengacu pada panduan teknis dari RPJMN. Sesuai dengan isi Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Tujuan pengaturan desa yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, salah satunya dapat diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagaimana diatur dalam pada bab X Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Pembentukan dan pengelolaan Bumdes juga diatur khusus dalam Permendes PDTT nomor 4 tahun 2015.

Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh aparat desa adalah kurang pahamnya aparat terkait dengan penyusunan RPJMDesa dan pengelolaan Bumdes. Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDesa dan pengelolaan Bumdes tidaklah mudah melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Pada umumnya banyak ditemukan desa-desa diwilayah Indonesia bahwa aparat desa mulai dari kepala desa, sekertaris desa dan jajarannya tidak semua berasal dari kelas menengah berpendidikan tinggi, tidak memiliki banyak pengalaman dan teori dalam bidang perencanaan. Permasalahan dimaksud juga terjadi di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur. Desa Dulukapa merupakan desa mekaran dari desa Deme I Kecamatan Sumalata. Karena adanya pemekaran wilayah maka aparat desa di desa Dulukapa pun di tempati oleh orang-orang baru. Sebagian besar dari aparat desa Dulukapa adalah orang-orang yang kurang memiliki pengetahuan dalam penyusunan RPJMDesa dan pengelolaan BUMDesa. Hal ini terbukti dengan pernah adanya BUMDesa di desa Dulukapa namun kemudian BUMDesa tersebut tidak jalan lagi di karenakan para pengelola BUMDesa tidak paham terkait dengan metode pengelolaan BUMDesa dan kurang paham bagaimana BUMDesa itu seharusnya dibentuk. Permasalahan yang sama juga ditemui pada penyusunan RPJMDesa, walaupun ditiap desa ada pendamping desa namun pengetahuan pendamping desa pun terbatas karena latar belakang pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan RPJMDesa dan pengelolaan Bumdes diperlukan pelatihan dan pendampingan khusus bagi Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Pada pelatihan dan pendampingan ini akan diberikan

metode perencanaan pembangunan melalui penyusunan RPJMDesa dan manajemen pengelolaan Bumdes.

2. MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh aparat desa Dulukapa adalah minimnya pengetahuan tentang penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes, penataan dan pengelolaan administrasi organisasi kepemudaan.

3. METODE

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan kepada aparat Desa untuk menyusun RPJMDesa dan pengelolaan Bumdes di desa Dulukapa. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah aparat desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur dan pengurus BUMDes.

Pelaksanaan pendampingan penyusunan RPJMDes dan Pengelolaan BUMDes dimulai dengan survei lokasi ke desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara. Survei dilakukan dengan wawancara kepada aparat desa dan pengurus BUMDes. Langkah kedua setelah survei, tim pengabdian dan aparat desa serta pengurus BUMDes mengidentifikasi masalah dan merancang solusi terhadap permasalahan yang ditemui dilapangan. Ada 3 (tiga) rancangan solusi yang ditawarkan 1) pelatihan penyusunan RPJMDesa yang dilaksanakan selama 2 hari yakni tanggal 30 April sampai dengan 01 Mei 2019. 2) pendampingan penyusunan RPJMDesa dilaksanakan sejak tanggal 6 mei sampai dengan 19 mei 2019. 3) pengelolaan Bumdes dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 22-23 Agustus 2019.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes di desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan sejak bulan april 2019 sampai dengan bulan agustus 2019. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dicapai dalam program kemitraan masyarakat ini antara lain :

a. Survei lokasi dan koordinasi dengan aparat desa Dulukapa Serta Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan survei ke lokasi pengabdian, yakni desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Karena yang menjadi objek dari kegiatan ini adalah aparat desa dan pengurus BUMDes, maka sasaran survei dibatasi pada objek dimaksud. Wawancara dijadikan sebagai metode dalam survei lokasi. Dari hasil wawancara dengan aparat desa tim pengabdian mendapatkan informasi bahwa sebagian besar aparat desa belum mengetahui cara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Padahal RPJMDes merupakan hal penting dalam sebuah pelaksanaan program desa. Selain permasalahan RPJMDes, aparat desa juga menyampaikan BUMDes yang nyaris tidak berjalan. BUMDes desa Dulukapa adalah peminjaman modal kepada para petani, namun modal yang diberikan oleh aparat dalam hal ini pengurus BUMDes belum dikembalikan oleh para petani sebagai peminjam modal. Hal ini kemudian yang menjadi masalah bagi pengelolaan BUMDes. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan

pengurus BUMDes terhadap pengelolaan BUMDes menjadi kendala utama dalam keberlangsungan BUMDes.

Kedatangan tim pengabdian kepada masyarakat di sambut baik oleh kepala desa Dulukapa. Program yang kami tawarkan yaitu pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes disambut dengan sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan penyambutan yang ramah oleh kepala desa tiap kali tim pengabdian datang dan antusiasnya kepala desa dalam menghadirkan aparat desa dalam setiap pertemuan.



Gambar 1: Wawancara dengan aparat desa Dulukapa

Selain melakukan survei dan koordinasi dengan aparat desa, tim pengabdian juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yakni ke dinas BPMDes, Bappeda dan Sekertaris Daerah Gorontalo Utara. Koordinasi ini dilakukan atas dasar; 1) kepala desa Dulukapa saat ini adalah kepala desa yang baru saja terpilih. Sebelumnya selama kurang lebih empat tahun desa Dulukapa, organisasi pemerintahannya ditangani oleh sekertaris desa karena kepala desa sebelumnya meninggal dunia di tahun pertama kepengurusan. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan BPMDes dan sekertaris daerah untuk meminta dukungan dari pemerintah terkait dengan program pengabdian. 2) Tim pengabdian menyadari betul tingkat apatisnya masyarakat, tidak terkecuali aparat desa untuk mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek dan sejenisnya. Sehingga dukungan dari lembaga pemerintahan daerah sangat dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan dimaksud. Sedangkan koordinasi dengan Bappeda dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara.



Gambar 2 : Konsultasi dengan Pemerintah Daerah

b. Pemecahan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada bagian masalah diatas, bahwa ada 2 (dua) permasalahan mitra yang akan menjadi target program pengabdian. Berikut adalah permasalahan mitra dan solusi yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah mitra.

No.	Masalah	Solusi
1.	Minimnya pengetahuan tentang penyusunan RPJMDes oleh aparat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RPJMDes - Pendampingan penyusunan RPJMDes
2.	Tidak adanya pengetahuan terhadap pengelolaan Bumdes	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaktifan kembali pengurus BUMDes - Mengidentifikasi dan mengkaji potensi desa baik potensi SDA dan SDM - Bimbingan teknis pengelolaan BUMDes.

Untuk bimbingan teknis BUMDes, peserta akan dibekali materi tentang teknik pengelolaan Bumdes, berupa konsep dasar, tujuan dan prinsip pengelolaan Bumdes serta desain pengembangan BUMDes. Adapun metode pembelajaran yang ditawarkan berupa penyampaian materi, tanya jawab dan konsultasi masalah dilapangan.



Gambar 3: Kajian Masalah

c. Hasil Kegiatan
1) Bimbingan Teknis

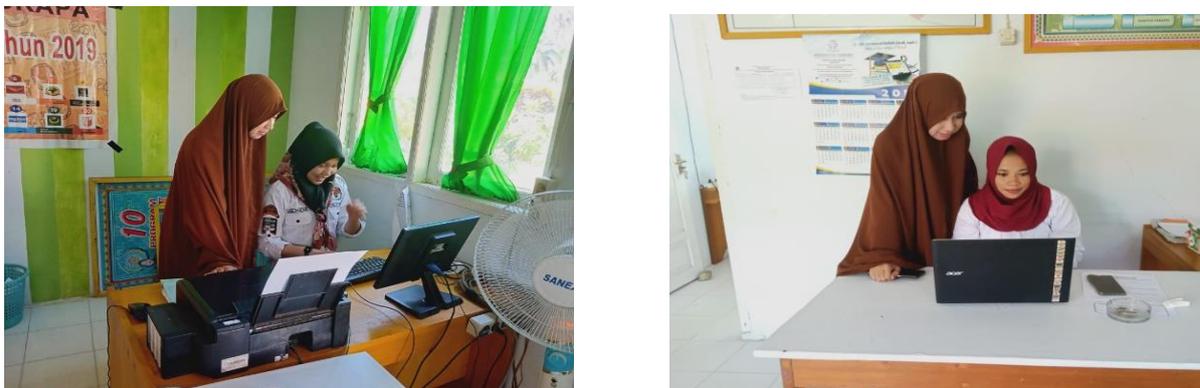
Bimbingan teknis yang dilaksanakan dihadiri oleh 25 orang peserta. 15 peserta dari aparat desa dan pengurus BUMDes, selebihnya adalah kepala-kepala desa dilingkungan Kecamatan Sumalata Timur dan pendamping desa yang turut berpartisipasi dalam bimtek. Pada bimtek ini tim pengabdian memberikan materi tentang pedoman penyusunan RPJMDes, tahapan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes. Materi pertama membahas regulasi-regulasi yang akan dijadikan pedoman penyusunan RPJMDes. Materi kedua, pemateri menyampaikan tahapan penyusunan RPJMDes. Ditahapan ini pemateri menjelaskan dengan detail tahapan penyusunan RPJMDes serta isi dari bab satu ke bab lainnya yang ada dalam RPJMDes. Materi terakhir berfokus pada pengelolaan BUMDes. Pada materi ini pemateri, selain menjelaskan tentang manajemen pengurus, bisnis *plan*, manajemen keuangan, masalah internal dan pengawasan, tim pengabdian juga memberikan *master plan* BUMDes. Bimtek untuk RPJMDes, selain pemberian materi juga dilakukan dengan metode *on job training*. Waktu pelaksanaan bimtek RPJMDes bertepatan dengan penyusunan RPJMDes desa Dulukapa, mengingat kepala desa Dulukapa baru saja terpilih. Hal ini kemudian yang menjadikan nilai tambah bagi tim pengabdian dan aparat desa, dimana bimtek penyusunan RPJMDes langsung dipraktekkan. Sehingga tim pengabdian melakukan pendampingan dengan turun ke desa dalam beberapa kali proses pendampingan.



Gambar 4 : Pembukaan Bimtek Penyusunan RPJMDes dan Pengelolaan BUMDes



Gambar 5 : Pemberian Materi Bimtek



Gambar 6: *On Job Training* Penyusunan RPJMDes



Gambar 7: Draft RPJMDes yang dirampungkan oleh tim pengabdian & aparat desa

2) **Pengelolaan BUMDes**

Berdasarkan hasil survei dan kajian bersama dengan aparat desa dan pengurus BUMDes, maka ada beberapa BUMDes yang akan direalisasikan oleh aparat desa dan pengurus BUMDes untuk memberdayakan BUMDes, yaitu;

1. Pengelolaan pantai Dulukapa untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Tim pengabdian memberikan konsep pantai sebagai tempat wisata yang dibuat dalam bentuk *master plan* pantai idaman. Dimana dalam *master plan* tersebut, konsep pantai dilengkapi dengan panggung budaya, sekolah adat, pusat kuliner, usaha banana boat.
2. Pembentukan kelompok UMKM. Pembentukan kelompok UMKM ini berfokus pada pembuatan ole-ole khas Gorontalo yakni koa dan baje. Kedua produk ini menjadikan *Lo Hulanthalo* sebagai merek jual dari produk yang di buat.

Untuk poin 1 (satu) pengelolaan pantai wisata, ini akan di implementasikan secara bertahap karena memerlukan anggaran yang besar. Aparat desa akan menggunakan sebagian anggarannya untuk proses implementasi BUMDes tersebut. Sementara untuk poin 2 (dua),

pengetahuan pengelolaan UMKM dari tiap tahapannya sudah mulai di jalankan oleh kelompok UMKM.



Gambar 8: Proses Pembuatan ole-ole oleh kelompok UMKM dan tim pengabdian



Gambar 9: Proses pengemasan

3) Capaian Kegiatan

Dari seluruh rangkaian program pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes, capaian dari hasil kegiatan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Mitra memiliki pengetahuan tahapan penyusunan RPJMDes
2. Terselenggaranya RPJMDes desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara periode 2019-2023
3. Meningkatnya pengetahuan mitra tentang pengelolaan BUMDes, seperti manajemen pengurus, bisnis plan, manajemen keuangan dan pengawasan terhadap organisasi.
4. Adanya konsep pantai wisata idaman (*Master Plan* pantai wisata Dulukapa)
5. Terbentuknya kelompok UMKM Lo Hulanthalo

5. SIMPULAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis terkait dengan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes. Dalam pelaksanaan pendampingan pengelolaan BUMDes ada beberapa poin penting yang di peroleh masyarakat, seperti manajemen pengurus, bisnis *plan*, manajemen keuangan, masalah internal dan pengawasan. Tim pengabdian juga memberikan *master plan* pantai wisata Dulukapa serta

pengelolaan UMKM. Adapun bentuk BUMDes yang ditawarkan, juga merupakan *follow up* dari RPJMDes yang dibuat bersama oleh tim pengabdian dengan peserta bimtek.

Hubungan yang kurang bersinergi antara sesama aparat desa dan aparat desa dengan pengurus BUMDes menjadi suatu kendala untuk membangun desa yang lebih baik ke depan. Hal ini juga menjadi kendala bagi tim pengabdian, sehingga tim pengabdian harus melibatkan pemerintah daerah demi kelancaran kegiatan dimaksud.

Kedepannya tim pengabdian berharap pengelolaan BUMDes desa Dulukapa bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan setelah program ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Asvi,Zul. Manajemen Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, di download pada 21 Agustus 2018 <https://media.neliti.com/media/publications/209021-manajemen-badan-usaha-milik-desa-bumdes.pdf>

Bandiyah.2016. *Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDesa Berbasis Partisipatif di Desa Lokasar, Sidemen, Karangasem,Bali*. Volume 1 nomor 1, di download pada 21 Agustus 2018 <file:///C:/Users/Asus/Downloads/53040-ID-pelatihan-dan-pendampingan-penyusunan-rp.pdf>

Agunggunanto, Edy Yusuf dkk. 2016.Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Volume 13 nomor 1

Lampiran :

